
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
DENGAN PANDEMI COVID-19 SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN**

Muhammad Luthfi Haryamto

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Edy Suprianto

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

luthifharyamto@std.unissula.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan pemoderasi Covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah 136 seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019-2020. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode *Moderated Regression Analysis*. Semua data yang diolah menggunakan Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Normalitas. Berdasarkan hasil pengujian statistik SPSS seri 22 bahwa hasil uji asumsi klasik yaitu tidak terjadi Multikolinearitas, terjadi Autokorelasi, tidak terjadi Heteroskedastisitas dan menunjukkan data yang berdistribusi normal setelah di outlier sebanyak 4 data. Berdasarkan hasil pengujian statistik t-hitung probabilitas PAD sebesar 0,000 ($P < 0,05$) dan t-hitung probabilitas Covid-19 sebesar 0,938 ($P > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dan Covid-19 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pandemi Covid-19

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of Regional Original Revenue on Capital Expenditures with Covid-19 moderating. Population in research these are 136 all provincial governments in Indonesia in 2019-2020. Type This research uses quantitative research methods. Collected data in this study is secondary. The sampling technique used namely purposive sampling method. The method used in this study is the documentation method. The analysis technique uses the Moderated method Regression Analysis. All data processed using Classical Assumption Test namely Multicollinearity Test, Autocorrelation Test, Heteroscedasticity Test, and Test Normality. Based on the results of the SPSS series 22 statistical test that the test results the classic assumption is that multicollinearity does not occur, autocorrelation occurs, does not occur Heteroscedasticity and shows data that are normally distributed after being analyzed outliers of 4 data. Based on the results of statistical tests t-count probability PAD is 0.000 ($P < 0.05$) and the t-calculated probability of Covid-19 is 0.938 ($P > 0.05$). This shows that PAD has a significant positive effect on Capital Expenditure and Covid-19 have an insignificant negative effect on spending Capital. Suggestions that can be given in this study are for researchers furthermore, it is recommended to add other variables that can affect Capital Expenditure

Keyword: *Regional Original Revenue, Capital Expenditures, Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berkembangnya tiap daerah yang ada pada Negara Indonesia ini sudah begitu besar dan juga pesat, hal ini sejalan dengan adanya desentralisasi fiskal dan juga kebijakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini memprioritaskan kemampuan dan juga peranan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta pembangunan yang diupayakan untuk menjadi lebih baik. Pemerintah daerah perlu melaksanakan perubahan susun belanja daerah, yang mulanya banyak

dianggarkan demi kepentingan belanja rutin yang tidak begitu produktif, dengan melaksanakan alokasi belanja yang merujuk pendanaan untuk penyelenggaraan layanan umum pada masyarakat untuk beberapa sektor yang lainnya. Melalui peningkatan belanja daerah ini, dengan demikian diperlukan besaran dana yang tidak sedikit agar belanja daerah ini bisa tercukupi dan terwadahi (Fatimah, Anita dan Danang, 2019).

Dana pengalokasian pada belanja modal dipengaruhi dengan besaran penerimaan daerah yang berkaitan itu sendiri. Pihak pemerintah daerah mampu

menaikkan penerimaan daerahnya tersebut dengan cara mengelola sumber daya daerah yang tersedia tersebut, yang mana bahwa ini kemudiakan akan masuk ke dalam pendapatan pendapatan asli daerah (PAD) yang di masa depan digunakan sebagai satu dari beberapa sumber pendanaan belanja modal yang ada. Lebih mendalam bahwa penerimaan daerah juga bersumberkan dari dana perimbangan, tidak sebataskan pada PAD. Apabila penerimaan PAD masih belum memenuhi belanja modal, maka pihak pemerintah daerah tersebut berharap bahwa dana transfer yang disediakan pihak pemerintah pusat itu dimaksudkan agar menutup alokasi dana belanja modal untuk tiap tahunnya tersebut. Untuk keadaan ini, dana perimbangan yang berperan sebagai penerimaan daerah ini kemudian dikirimkan pihak pemerintah pusat ini biasanya diperjadikan sebagai sumber pembiayaan untuk keperluan semua aktivitas pemerintah daerah itu sendiri.

Dikutip dari Tribun Jogja (2017), pada tahun 2017 serapan anggaran di Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan juga Kabupaten Magelang ini dianggap tidak begitu tinggi. Sampai di bulan Desember 2017 pertengahan, penyerapan anggaran pada tiga daerah ini hanya berada pada titik 54 persen. Hal tersebut diakibatkan belanja modal yang masih rendah. Penyebab lain rendahnya capaian penyerapan yaitu terlambatnya penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM). Dikutip dari Tribun Solo (2018), pada tahun 2018 serapan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada pada

Kota Solo ini masih dianggap tidak tinggi. Tercatat serapan APBD Kota Solo baru mencapai 47 persen. Terdapat aktivitas organisasi dan juga perangkat daerah yang sudah berlangsung, akan tetapi anggaran ini masih belum dapat dilaksanakan pencairan. Artinya, angka serapan ini disebabkan bahwa pencairan yang dilaksanakan tersebut waktunya di akhir. Namun pada tahun 2020, terjadi Pandemi Covid-19 yang membuat APBD pemerintah daerah di Indonesia perlu direvisi. Dikutip dari Berita Satu (2020), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan mengalami pengurangan hingga 40 persen pada tahun 2020 akibat dari Pandemi Covid-19. Anggaran yang berkurang tersebut meliputi DAK, DAU, DBH dari Pemprov Sumut, serta PAD yang menurun. Anggaran yang ada saat ini akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Medan. Dikutip dari Antara News (2020), target pencapaian PAD Kota Surabaya tahun anggaran 2020 perlu direvisi akibat dari pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 yang terjadi sekitar kurang lebih tiga bulan, cukup memukul perekonomian di Surabaya sehingga menurunnya PAD yang diperkirakan mencapai 50 persen.

Dari permasalahan pada Tribun Jogja (2017), dan Tribun Solo (2018) pengalokasian APBD Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal. Hal ini memberikan pengaruh untuk penggunaan PAD yang masih dianggap tidak optimal, yang mana bahwa pemerintah daerah tersebut masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan yang bersumberkan dari

pemerintah pusat yang berguna untuk melaksanakan pendanaan untuk semua pengeluaran daerahnya tersebut. Namun pada tahun 2020 terjadi kasus pandemi Covid-19 dunia. Hal tersebut mengakibatkan pergerakan ekonomi di Indonesia, terutama pada tiap provinsi menjadi bermasalah. Seperti yang terjadi pada Berita Satu (2020) dan Antara News (2020), pengalokasian APBD di tiap daerah perlu dilakukan revisi. Hal tersebut juga membuat PAD pada daerah mengalami penurunan karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi Covid-19.

Menurut Juniawan & Suryantini (2018) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) ini didefinisikan sebagai bagian pemasukan daerah yang didapatkan atau bersumberkan dari sumber daya yang ada pada daerah itu sendiri yang tidak mencangkup dengan dana perimbangan dan juga penerimaan yang lain sebagainya. Besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah akan disesuaikan dengan alokasi belanja modal dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, jika PAD tersebut tinggi, hal ini akan memberikan pengaruh yang positif pada alokasi belanja modal tersebut. Hal ini memungkinkan pemerintah provinsi tersebut agar menciptakan infrastruktur dan memajukan daerahnya dengan mementingkan belanja modalnya. Berdasarkan penelitian Paramartha & Budiasih (2016) dan Aqnisa (2016), mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah ini memberi pengaruh yang positif pada belanja modal tersebut.

Namun berbeda dengan penelitian Dwianto (2016), yang mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah ini memberi pengaruh yang negatif pada belanja modal tersebut.

Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai satu dari berbagai sumber pendapatan yang fundamental untuk suatu daerah tertentu itu sendiri. Di tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap provinsi memiliki peningkatan dari tahun sebelumnya. PAD banyak di alokasikan ke belanja modal untuk peningkatan infrastruktur. Komponen yang berperan utama dalam peningkatan tersebut yaitu pajak daerah, kemudian di susul komponen lainnya seperti lain sebagainya yang sah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir retribusi daerah. Lalu pada awal tahun 2020, terjadi bencana pandemi Covid-19 yang membuat PAD pada tiap daerah mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada pajak hotel dan restoran karna hampir tidak ada pengunjung hotel dan restoran. Hal tersebut karena diberlakukannya pembatasan sosial pada tiap daerah. Pengalokasian pada anggaran yang ada akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Rumusan Masalah

Fenomena pada penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu belanja modal harus di peruntukan untuk infrastruktur dan apabila semua biaya yang digunakan untuk pembiayaan pandemi Covid-19 maka anggaran belanja modal akan rendah. Sehingga

rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia tahun 2019-2020.
2. Apakah pengaruh Covid-19 dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia tahun 2019-2020

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Covid-19 dapat memoderasi antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Grand Theory

Teori keagenan (*agency theory*) didefinisikan sebagai suatu teori yang menerangkan keterkaitan hubungan antara *agent* (eksekutif) dengan *principal* (legislatif). Pihak legislatif (*principal*) didefinisikan sebagai pihak yang nantinya memberi rekomendasi, amanah, dan pesan pada pihak *agent* agar melaksanakan suatu layanan jasa tertentu dengan mengatasmakan pihak

principal tersebut, sedangkan itu pada pihak *agent* merupakan pihak yang diberikan mandat atau rekomendasi oleh *principal*. Menurut Halim & Abdullah (2006) menjelaskan bahwa teori keagenan ini didefinisikan sebagai suatu teori tertentu yang mengungkapkan atau memperjelaskan keterkaitan hubungan antara pihak *agent* dengan pihak *principal*, yang mana bahwa satu dari beberapa pihak dari *principal* tersebut menyusun suatu kontrak tertentu, baik itu yang secara eksplisit ataupun yang implisit, dengan melibatkan pihak *agent* yang tujuannya ialah agar pihak *agent* tersebut nantinya melaksanakan suatu pekerjaannya nanti sebagaimana diharapkan pihak *principal* itu sendiri. Pihak *principal*, dalam hal ini ialah berperan sebagai legislative, yakni menyediakan berbagai informasi yang berguna untuk pihak *agent* yang berperan sebagai pihak eksekutif agar melaksanakan pengolahan untuk berbagai informasi yang diberikannya tersebut. Hasil dari pengolahan informasi ini berguna dalam mengambil keputusan yang dilaksanakan pihak *principal* tersebut nantinya.

Pada teori keagenan tidak senantiasa membuahkan hasil yang bagus, yang mana bahwa pihak *principal* tersebut mempunyai rasa yakin bahwa pihak *agent* tersebut tidak senantiasa melaksanakan yang paling baik demi kepentingan dan juga keperluan dari pihak *principal* itu sendiri. Menurut Astika (2010) menjelaskan bahwa teori keagenan ini mengungkapkan bahwa entitas ini dianggap sebagai hal yang begitu fundamental atas berbagai

hubungan keagenan serta berupaya untuk mengerti beberapa perilaku organisasi dengan cara melaksanakan pengujian bagaimanakah beberapa pihak yang berkaitan dengan hubungan keagenan ini mampu mengoptimalkan utilitas yang ada dengan cara berkooperasi. Teori keagenan ini pada dasarnya ialah sebagai upaya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kontrak tertentu berdasarkan pada upaya menyelarkan atau menyesuaikan kepentingan yang ada, dengan melibatkan pihak principal dengan pihak agent, dalam hal ini jika berlangsung terdapatnya suatu konflik kepentingan tertentu yang terjadi.

Di dalam sektor publik yang ada ini, keterkaitan hubungan keagenan ini juga dapat ditinjau berdasarkan dalam menyusun anggaran yang ada. Menurut Halim & Abdullah (2006) menjelaskan bahwa anggaran daerah ini didefinisikan sebagai perencanaan keuangan yang menjadi landasan dan juga dasar dalam melaksanakan layanan publik yang ada. Anggaran daerah, di Negara Indonesia ini dianggap sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik itu untuk kota, provinsi, dan juga kabupaten. Proses dalam menyusun anggaran ini ialah dengan melibatkan dua pihak tertentu, yakni pihak legislatif dan juga eksekutif, tiap pihak tersebut memiliki tim penganggaran di dalamnya. Pihak eksekutif kemudian menyusunkan perancangan APBD yang berdasarkan pada KUA-PPAS, setelahnya diberikan pada pihak legislative agar dibahas dan juga dipelajari sebelum perancangan

tersebut ditentukan sebagai peraturan daerah yang ada.

Belanja Modal

Merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 tahun 2019 menjelaskan bahwa belanja modal didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran anggaran agar mendapatkan asset tetap dan juga asset yang lainnya yang memberi manfaat tertentu selama lebih dari satu periode akuntansi yang ada dan terjadi. Merujuk pada pendapat yang dinyatakan Badrudin (2017, hal 71-72) menjelaskan bahwa belanja modal ini dilaksanakan pengkategorisasian ke dalam lima kategori yang utama, yaitu: (1) Belanja Modal Tanah, (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (5) Belanja Modal Fisik Lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

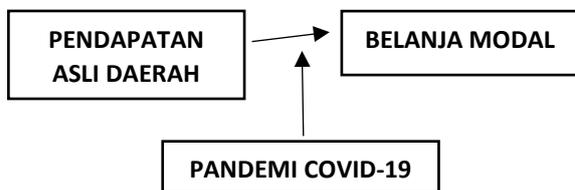
Pendapatan daerah dikelompokan yang terdiri dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan juga berbagai pendapatan daerah yang sah lainnya. Pendapatan asli daerah ini didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dan dipungut pihak daerah berdasarkan peraturan daerah yang selaras pada aturan perundang-undangan yang ada (Badrudin, 2017:hal 52). Sedangkan, dana perimbangan ini didefinisikan sebagai dana yang bersumberkan atas pendapatan APBN yang disalurkan pada pihak daerah guna melaksanakan pendanaan kebutuhan

daerah dan juga melakukan desentralisasi ini (Badrudin, 2017: hal 100). Merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 menunjukkan bahwa sumber dari pendapatan daerah ini sumbernya ialah dari pendapatan asli daerah, dalam hal ini terdiri atas hasil dari pengelolaan untuk kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, dan juga berbagai PAD yang sah lainnya.

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan suatu peristiwa menyebarnya penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* jenis baru yang tersebar diseluruh dunia Wikipedia (2020).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kernagka Pemikiran

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berkaitan dengan teori *agency*, apabila implementasi dari teori keagenan ini mampu menyebabkan munculnya berbagai hal yang positif dan juga baik yang berbentuk dengan efisiensi, maka pemerintah mampu menjalankan dengan baik, transparan, demokratis, adil dan tanggung jawab. Namun apabila timbul hal yang tidak baik atau negatif yang berbentuk dengan perilaku yang sifatnya oportunistik, hal tersebut berlangsung

disebabkan dengan keegoisan masing-masing pihak *agent* (eksekutif) yang mempunyai beberapa keunggulan informasi namun pada *principal* (legislatif) memanfaatkan keunggulan kekuasaan sendiri. Hal ini menunjukkan timbulnya berbagai tindakan yang inproduktif dalam menyelenggarakan pemerintah provinsi secara keseluruhan. Menurut Pradana & Handayani (2017) apabila belanja modal tersebut dapat menaikkan partisipasi publik dalam proses pembangunan ini, maka kualitas layanan publik akan meningkat.

Pada penelitian yang dilaksanakan Paramartha & Budiasih (2016) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah memberi sumbangsih pengaruh yang positif pada belanja modal. Penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Juniawan & Suryantini (2018) dan Pradana & Handayani (2017) yang dimana bahwa pendapatan asli daerah memberi sumbangsih pengaruh yang positif pada belanja modal.

H₁ = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai Pemoderasi

Berkaitan dengan teori *agency*, apabila penerapan teori keagenan dapat menyebabkan timbulnya berbagai hal yang tidak baik atau negatif yang berbentuk dengan perilaku oportunistik itu sendiri, hal tersebut berlangsung

disebabkan dengan keegoisan masing-masing pihak *agent* (eksekutif) mempunyai keunggulan informasi namun pada *principal* (legislatif) memanfaatkan keunggulan kekuasaan sendiri. Hal ini menunjukkan timbulnya berbagai tindakan yang tidak menghasilkan suatu hal yang baik (tidak produktif) dalam menyelenggarakan secara keseluruhan pemerintah provinsi ini.

Pada penelitian Dwianto (2016) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah memberi sumbangsih pengaruh yang negatif pada belanja modal tersebut. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Setiyani (2015), dimana pendapatan asli daerah berpengaruh negatif pada belanja modal tersebut.

H₂ = Pandemi covid-19 Memoderasi Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah berupa metode penelitian kuantitatif, hal ini disebabkan bahwa data penelitian ini ialah berbentuk dengan angka dan juga penganalisisan penelitian ini bersifat statistik.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020. Pemilihan sampel pada penelitian ini menerapkan *purposive sampling method*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi melaporkan laporan keuangan per semester berturut-turut dari Tahun 2019-2020.
2. Semua indikator variabel dalam penelitian ini terdapat pada laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

Data penelitian yang diambil dan digunakan ini ialah berbentuk dengan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi yang ada pada negara Indonesia, yang berupa data realisasi PAD dan juga Belanja Modal yang diperoleh dari website/situs resmi.

Pengukuran Variabel

Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator Variabel ini diukur:

Belanja Modal = belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi, dan jaringan + belanja aset lainnya

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ini didefinisikan sebagai pendapatan yang didapatkan atau dihasilkan suatu daerah tertentu, lalu dilaksanakan pemungutan berlandaskan atau berpedomankan terhap aturan daerah yang selaras dengan aturan perundang-undang yang saat ini berlaku (Badrudin, 2017). Indikator Variabel ini diukur:

PAD = Hasil pajak daerah + retribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pandemi	136	.00	1.00	.5000	.50185
Valid N	136				

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan suatu peristiwa menyebarnya penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang tersebar diseluruh dunia Wikipedia, (2020). Indikator Variabel ini diukur dengan dummy:

Kode 1 = tahun adanya pandemic Covid-19, dan Kode 0 = tahun sebelum adanya pandemic Covid-19.

Variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar Rp 24 Miliar yaitu pada Provinsi Banten tahun 2020 semester 1 dan nilai maksimum sebesar Rp 18 Triliun ada pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 semester 2. Variabel BM menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 918 Miliar, artinya selama periode 2019-2020 per semester diperoleh rata-rata belanja modal sebesar Rp 918 Miliar. Dan untuk standar deviasi sebesar Rp 1,924 Triliun yang dapat diartikan bahwa variabel belanja modal mempunyai standar deviasi yang lebih besar daripada rata-rata sehingga sebarannya tidak merata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskriptifkan mengenai variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independennya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel dependennya yaitu Belanja Modal. Pengukuran yang digunakan dalam analisis ini yaitu menggunakan nilai maksimum, minimum, rata-rata serta standar deviasi. Berikut tabel hasil analisis statisti deskriptif menggunakan SPSS 22:

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp 53 Miliar yaitu pada Provinsi Maluku Utara tahun 2020 semester 1 dan nilai maksimum sebesar Rp 57 Triliun ada pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 semester 2. Variabel PAD menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 3,630 Triliun, artinya selama periode 2019-2020 per semester diperoleh rata-rata PAD sebesar Rp 3,630 Triliun. Dan untuk standar deviasi sebesar Rp 7 Triliun, yang artinya bahwa variabel pendapatan asli daerah mempunyai standar deviasi yang lebih besar daripada rata-rata sehingga sebarannya tidak merata.

Tabel 1

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
PAD	136	5307659600	57561162309000	3630209624139.71	7402515035100
BM	136	2442362100	18041247738000	918271177882.35	1924242726437

Variabel Pandemi memiliki nilai minimum sebesar 0 yaitu pada Provinsi yang mengeluarkan laporan keuangan APBD tahun 2019 semester 1 dan 2, kemudian nilai maksimum sebesar 1 pada Provinsi yang mengeluarkan laporan keuangan APBD tahun 2020

semester 1 dan 2. Variabel Pandemi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,500 artinya 50,0% dari seluruh pengeluaran APBD tahun 2019-2020 mengalami efek dari pandemi. Dan untuk standar deviasi sebesar 0,50185 yang artinya bahwa variabel pandemi mempunyai standar deviasi yang sama dengan rata-rata sehingga sebarannya merata.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dinyatakan lolos karena pada uji normalitas nilai probability valuenya sebesar $0,083 > 0,05$, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel bernilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,10$, pada uji heterokedastisitas juga menunjukkan nilai $sig > 0,05$ yang artinya terbebas dari gejala heterokedastisitas. Pada hasil uji autokolerasi pada penelitian ini terdapat gejala autokolerasi.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 2

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
3	.537 ^c	.288	.271	3.78886

Berdasarkan Tabel 2, Nilai *R Square* sebesar 0,288 menunjukkan bahwa variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent dan variabel moderasi yaitu 28,8%, sedangkan sisanya sebesar 71,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 3

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
3	Regression	743.487	3	247.829	17.264	.000 ^d
	Residual	1837.500	128	14.355		
	Total	2580.987	131			

F hitung sebesar $17,264 > F$ tabel sebesar 3,07 artinya bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal atau secara bersamaan semua variable berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji Hipotesis

Tabel 4

Uji Hopotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
3	(Constant)	11.652	3.193		3.649	.000

LnPA				5.18	
D2	.494	.095	.544	7	.000
PAND					
EMI	.351	4.531	.040	.077	.938
MOD					
ERAS	-.015	.135	-.057	-.110	.912
I					

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$BM = 11,652 + 0,494 (PAD) - 0,015 (Moderasi) + e$$

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil uji t untuk Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil uji t senilai 5,197 dengan nilai sig = 0,000 < 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini disebabkan pemerintah menjalankan dengan baik, transparan, adil, demokratis, dan bertanggung jawab. Maka hipotesis pertama **Diterima**.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai pemoderasi

Hasil uji t untuk moderasi Covid-19 menunjukkan hasil uji t senilai -0,110 dengan nilai sig = 0,912 > 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan Covid-19 sebagai pemoderasi berpengaruh negatif tidak signifikan pada hubungan PAD terhadap belanja modal, hal ini disebabkan data pada tahun terjadinya covid masih sedikit kasus covid yang terjadi di Indonesia. Maka diperlukan penelitian

lebih lanjut untuk mengetahui dampak dari Covid-19 antara PAD terhadap belanja modal apabila pandemi ini berlangsung jangka panjang.

Kesimpulan

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
2. Covid-19 sebagai pemoderasi berpengaruh negative tidak signifikan pada hubungan PAD terhadap belanja modal.

Implikasi

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan atau memasukan variabel lain yang lebih bervariasi seperti pertumbuhan ekonomi atau kebijakan pemerintah.
2. Bagi Pemerintah Provinsi, diharapkan lebih meningkatkan anggaran yang diprioritaskan untuk belanja modal karena melihat dari Pengaruh PAD yang positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peningkatan anggaran belanja modal untuk kemajuan daerah provinsi.

Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memperhatikan faktor eksternal seperti pengambilan data yang hanya melalui website BPS, penerapan lockdown atau pppm di masyarakat, dan bertambahnya kasus covid di Indonesia.

2. Kurangnya literatur-literatur pendukung yang dapat diperoleh penulis mengenai pengaruh PAD terhadap belanja modal dengan Covid-19 sebagai pemoderasi untuk menjadi acuan dalam penyusunan skripsi.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengambil data langsung ke kantor BPS untuk informasi data yang lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan penerapan lockdown atau ppkm dan bertambahnya kasus covid sebagai variabel tambahan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan literatur-literatur lain sebagai referensi pendukung mengenai variabel yang berpengaruh terhadap belanja modal.

DAFTAR REFERENSI

- Aqnisa, R. F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. In *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Astika, P. I. B. (2010). *Teori Akuntansi: Konsep-Konsep Dasar Akuntansi Keuangan*. Buku Satu. Buku Ajar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Azhar, M. R. (2018). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. In *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah* (Edisi 2). UPP STIM YKPN.

Dwianto, A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. In *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>

Ferri, R. (2017, December 20). *Serapan di Tiga Daerah di Jawa Tengah Rendah, Pembangunan Tidak Optimal*. Tribun Jogja. <https://jogja.tribunnews.com/2017/12/20/serapan-di-ketiga-daerah-di-jawa-tengah-rendah-pembangunan-tidak-optimal?page=all>

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (Edisi 7). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hakim, A. (2020). *Target PAD Surabaya direvisi dampak Covid-19*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/1539928/target-pad-surabaya-direvisi-dampak-covid-19>

Halim, A., & Abdullah, S. (2006).

- Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53–64.
- Hasbullah, R. N. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. In *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255–1281.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05>
- Karwur, J. C., Ilat, V., & Warongan, J. D. . (2018). Flypaper Effect Atas Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 88–98.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19104.2018>
- Maulana, A. S., & Nubatonis, A. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Nilai Ekspor Pertanian Indonesia. *Agrimor*, 5(4), 69–71.
<https://doi.org/10.32938/ag.v5i4.1166>
- Moerti, W. (2020). *Data Terkini Covid-19 di Indonesia Desember 2020*. Merdeka.Com.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html>
- Paramartha, M., & Budiasih, I. (2016). Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Khusus Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1536–1564.
- Pradana, Y. E., & Handayani, N. (2017). Pengaruh PAD , DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 868–889.
- Prasetya, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). In *Skripsi*. Universitas Negri Padang.
- Saputro, I. (2018, October 2). *Masuki Triwulan III, Serapan APBD Solo Masih 47 Persen*. Tribun Solo.
<https://solo.tribunnews.com/2018/10/02/masuki-triwulan-iii-serapan-apbd-solo-masih-47-persen>
- Setiyani, R. D. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPa) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. In *Naskah Publikasi*.
<https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Sianturi, A. H. (2020, April 19). *Pandemi Covid-19, Pemkot Medan Sesuaikan Alokasi APBD 2020*. Berita Satu.
<https://www.beritasatu.com/nasional/622633-pandemi-covid19-pemkot-medan-sesuaikan-alokasi-apbd-2020>

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Edisi 2). Alfabeta.

<https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-total-anggaran-penanganan-covid-19-mencapai-rp-10352-triliun>

Suryanto, V. (2020). *BPK: Total anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 1.035,2 triliun*. Kontan.

Wikipedia. (2020). *Pandemi Covid-19*. Wikipedia Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19